

Sumber Bacaan

- Arimbi HP, "Penghancuran Secara Sistematis Sistem-Sistem Adat oleh Kelompok Dominan", *Kertas Posisi Walhi No. 06*, Walhi, 1997.
- BP. Kapet Batui, "Rencana Pengembangan Investasi," *Bisnis Plan*, Edisi Kedua, Tahun 2002-2006.
- BP. Kapet Batui, "Laporan", *Prospek Investasi Kapet Batui Propinsi Sulawesi Tengah*, tanpa tahun.
- BP. Kapet Batui, "Laporan", *Prospek Investasi Kapet Batui Propinsi Sulawesi Tengah*, tanpa tahun.
- Depdikbud-Ditjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Sejarah Sulawesi Tengah*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sulawesi Tengah, 1996/1997.
- Deptrans dan PPH RI, Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, "Ringkasan", *Rencana Teknis Pembinaan UPT Dataran Bulan II Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah*, TA. 1999/2000".
- Deptrans dan PPH RI, Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, "Ringkasan", *Rencana Teknis Pembinaan UPT Dataran Bulan III Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah*, TA. 1999/2000".
- H.A. Mattulada, "Manusia dan Kebudayaan Kaili di Sulawesi Tengah," dalam *Majalah Ilmiah GAGASAN*, Universitas Tadulako, No. Ketiga, Tahun I, Desember 1985.

- Harian Mercusuar, *"Pola Insitu dan Penegasan Wilayah Adat Alternatif: Catatan dari Dialog Kebijakan Tentang Tau Taa dan Resettlement"*, 23 Oktober 1999.
- James P. Spreadley, *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogya, 1997.
- Jane Monnig Atkinson, "Agama dan Suku Wana di Sulawesi Tengah", dalam Michael Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- ,, "Orang Wana dan Agama di Sulawesi", *Kertas Kerja Hasil Penelitian 1974-1979*, Alih Bahasa Azmi Sirajuddin AR.
- Jeo, *Kumpulan Catatan Harian Pengorganisasian*, Tahun 2000 - 2001
- J.W.M. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, 1992.
- Kartika, Sandra & Candra Gautama, "Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara", *Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara*, Jakarta, 15-16 Maret 1999.
- Ketetapan MPR RI, Nomor XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia.
- Ketetapan MPR RI, Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Konvensi ILO 169, mengenai, *Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka*, dalam ELSAM Jakarta dan LBBT Pontianak, 1994.
- Lembar Fakta 09, "Hak Penduduk Asli," dalam Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia, *Lembar Fakta HAM*, Komnas HAM, Jakarta.
- Maria Rita Ruwiasuti, dkk., *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa dan Politik Hukum Agraria*, KPA dan INPI Pact, Bandung, 1997.
- Nasution Camang, "Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Adat Taa," Makalah disampaikan dalam *Dialog Kebijakan tentang Tau Taa dan Resettlement*, di Gedung SKB Luwuk, 18 Oktober 1999, diselenggarakan oleh YMPP bekerjasama dengan Walhi Sulteng dan Banggai Pos.

- , "Hutan dalam Kebudayaan Tau Taa Wana," Artikel masukan untuk penulisan *Buku Bunga Rampai Kearifan Tradisional* oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2001
- , "Memahami Duduk Soal KAPET Batui Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah," *Laporan Studi Dasar Program Pelembagaan Demokrasi di Pedesaan dalam Kerangka Otonomi Daerah di Wilayah KAPET Batui*, YMPP, Desember 2001.
- Ramli, Rizal & Mubariq Ahmad, *Rente Ekonomi Pengusaha Hutan di Indonesia*, Walhi, Jakarta, 1993.
- Richard B. Primack, dkk., *Biologi Konservasi*, Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- R. Yando Zakaria, *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Walhi, 1994
- Stepanus Juweng (editor), *Manusia Dayak: Orang Kecil yang Terperangkap Modernisasi*, IDR, Pontianak, 1996.
- Umar Juworo & Walid Syaikhun, *Kawasan Timur Indonesia: Pertumbuhan dan Pengembangan KAPET Wilayah KTI*, CIDES, Jakarta, 1997
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen IV
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria,
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
- Wahyudin, "Laporan", *Pengorganisasian Advokasi Kasus Relokasi Masyarakat Adat Taa Bulang Agustus-Oktober 1999*, Yayasan Merah Putih Palu, 1999
- dan Zainal, "Profil Masyarakat Adat Taa Bulang," *Laporan Studi Data Dasar*, Yayasan Merah Putih Palu (YMPP), Januari 1999.

- Yayasan Merah Putih Palu, "Notulensi", *Pogombo Ada (Pertemuan Adat) tentang Pangale Kapali Sarambe*, Lipu Mpoa, 18-20 Desember 2000.
- , "Pendampingan Komunitas Tau Taa tahun 2000", *Kumpulan Catatan Ringkas Wahyudin*.
- , "Kumpulan Surat Tau Taa Wana Bulang".
- , "Laporan", *Investigasi Kasus Relokasi Masyarakat Adat Taa Bulang*, Oktober 1999
- , Walhi Sulteng, Banggai Pos, "Notulensi", *Dialog Kebijakan tentang Tau Taa dan Resettlement*, Gedung SKB Luwuk, 18 Oktober 1999.
- , "Laporan Akhir" *Program Pengorganisasian Penguatan Sistem Pemukiman Komunal Tau Taa Bulang*, Tahun 2001.
- , "Laporan Perkembangan", *Program Pengorganisasian Penguatan Sistem Pemukiman Komunal Tau Taa Bulang*, Januari-Juni 2002.
- , "Laporan Perkembangan", *Program Pengorganisasian Penguatan Sistem Pemukiman Komunal Tau Taa Bulang*, Juli-September 2002.
- , "Laporan Perkembangan", *Program Pengorganisasian Penguatan Sistem Pemukiman Komunal Tau Taa Bulang*, Oktober-Desember 2002.
- , "Laporan Prosiding", *Pemetaan Wilayah Adat Tau Taa Bulang*, Tahun 2001.
- , "Laporan Implementasi", *Program SHK Walhi Sulteng Pada Komunitas Masyarakat Adat Tau Taa Bulang*, 2001.
- , "Notulensi Proses", *Dialog Tau Taa Wana Bulang dengan Pemerintahan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Poso*", YMPP, 4 November 2002.
- Yayasan Sahabat Morowali, "Hutan dalam Pandangan Orang Wana," *Laporan Hasil Studi*, 1998.